

**ANALISIS KEMAMPUAN APARAT PEMERINTAH KELURAHAN
DALAM KEBERHASILAN PEMBANGUNAN FISIK
(Studi di Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton Kota Bandar
Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh
Ilham Kurniawan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

ANALISIS KEMAMPUAN APARAT PEMERINTAH KELURAHAN DALAM KEBERHASILAN PEMBANGUNAN FISIK (Studi di Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)

Oleh
Ilham Kurniawan

Kapasitas yang masih rendah merupakan bagian dari permasalahan yang ditunjukkan di lapangan. Diantaranya masih belum optimalnya aspek kelembagaan, sumberdaya manusia, maupun manajemen pemerintahan kelurahan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kemampuan aparat pemerintah kelurahan dalam keberhasilan pembangunan fisik di Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. Tipe penelitian adalah penelitian deskriptif, Fokus dalam penelitian ini adalah kemampuan aparat pemerintah kelurahan dalam keberhasilan pembangunan fisik di Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan aparat kelurahan dalam pembangunan fisik di Kelurahan Sepang Jaya dapat kita lihat dari adanya upaya pengawalan yang intensif dari pihak aparat pemerintahan kelurahan termasuk Lurah beserta jajarannya yang bekerjasama dengan Kepala Lingkungan yang merupakan tokoh masyarakat di daerahnya. Sebagai pemerintah tingkat bawah pemerintah kelurahan hanya bisa mengusulkan serta mendampingi semua pembangunan secara fisik yang ditetapkan oleh hasil Musrembang di tingkat kecamatan. Karena pemerintah kelurahan hanya bisa menjalankan perintah koordinasi dari pemerintah tingkat kecamatan yang merupakan wilayah administrasinya. Peranan pemerintah kelurahan sebagai pelayan masyarakat : Dalam melayani masyarakat pemerintah kelurahan bisa dikatakan telah memuaskan warga sehingga pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan Sepang Jaya dapat berjalan atau terlaksana dengan lancar karena adanya dukungan dari seluruh masyarakat.

Kata Kunci: Kemampuan aparat, pembangunan fisik

ABSTRACT

ANALYSIS ABILITY AUTHORITIES AND VILLAGES IN THE SUCCESSFUL DEVELOPMENT OF PHYSICAL (Studies in the Village Sepang Jaya subdistrict Kedaton Bandar Lampung)

By
Ilham Kurniawan

Capacity is still low is part of the problem indicated in the field. Which are still not optimal institutional aspects, human resources, and management of the village government. The research objective was to determine the ability of government officials villages in the success of physical development in Sub Sepang Jaya subdistrict Kedaton Bandar Lampung. This type of research is descriptive research focus of this research is the ability of government officials villages in the success of physical development in Sub Sepang Jaya subdistrict Kedaton Bandar Lampung. Data have been obtained will then be analyzed descriptively a study that aims to create descriptive, picture or painting in a systematic, factual and accurate information on the facts, nature and the relationship between the phenomenon investigated. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the ability of authorities subdistrict in physical development in Sepang Jaya subdistrict we can see from their efforts to escort intensive of the authorities of the village government including the village chief and its staff in cooperation with the Chief of the Environment who are prominent figures in the region , As a low-level government administrative government could only propose and accompany all physical development set by Musrembang results at the district level. Because the village government can only execute commands coordination of the subdistrict level, which is an administrative territory. The role of village government as a public servant: In serving the community government could be said to have satisfactory village residents that the construction carried out in Sepang Jaya village can walk or implemented smoothly because of the support of the entire community.

Keywords: Ability apparatus, physical development

**ANALISIS KEMAMPUAN APARAT PEMERINTAHAN KELURAHAN DALAM
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN FISIK**

(studi di kelurahan sepang jaya kecamatan kedaton kota Bandar lampung)

Oleh

Ilham kurniawan

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2016

Judul Skripsi

**: ANALISIS KEMAMPUAN APARAT
PEMERINTAH KELURAHAN DALAM
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN FISIK
(Studi di Kelurahan Sepang Jaya
Kecamatan Kedaton Kota Bandar
Lampung)**

Nama Mahasiswa

: Ilham Kurniawan

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1016021020

Jurusan

: Ilmu Pemerintahan

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan



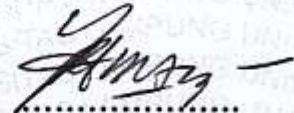
Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.
NIP 19600729 199010 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP.**



Penguji Utama

: **Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya

NIP 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 Desember 2016

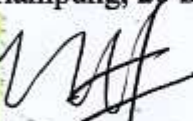
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar dalam pemyataan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandarlampung, 20 Desember 2016




Ilham Kurniawan
NPM. 1016021020

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Ilham Kurniawan, dilahirkan di Krui Kabupaten Pesisir Barat pada 04 September 1992. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara yang merupakan anak dari pasangan Bapak Amigusman, S.H., dan Ibu Nurlegam.

Jenjang akademis penulis diselesaikan dari Sekolah Dasar Negeri 2 Gunung Kemala Krui pada tahun 2004, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pesisir Tengah Krui pada tahun 2007, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas SMAN 1 Pesisir Tengah Krui yang selesai tahun 2010. Selanjutnya pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

MOTTO

**“ Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”.
(QS. Albaqarah: 286)**

**“Berlelah-lelah, manisnya hidup terasa setelah berjuang
(Imam Syafi’i) ” .**

**Teruslah bergerak, karena berhenti artinya mati.
(ILHAM KURNIAWAN)**

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahiim

*Alhamduillahirabbil'alamiin, telah Engkau Ridhai Ya Allah langkah hambaMu,
Sehingga skripsi ini pada akhirnya dapat diselesaikan*

*Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad S.A.W.
Semoga Kelak Skripsi ini dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat
Sebagaimana Suri Tauladan yang diajarkan Kepada Kita*

dan

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada

Ayahandaku Amigusman SH dan Ibundaku Nurlegam, sebagai tanda bakti,
hormat dan cintaku. Terimakasih atas do'a dan restu yang telah diberikan.
Semoga karya sederhana ini, dapat membuat bangga dan memberikan
kebahagiaan atas segala jerih dan payah yang telah dikerjakan

Terimakasih untuk Saudara-saudari dan sahabat-sahabat seperjuangan di Jurusan
Ilmu Pemerintahan, semoga kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan
Jannah dari Allah S.W.T.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Peranan Dinas Pekerja Umum (PU) Kabupaten Mesuji Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan (Study di Kecamatan Tanjung Raya)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang terlibat di dalamnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dan moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT atas segala yang telah engkau berikan kepada hamba, baik rezeki, kesehatan, kekuatan, kesabaran daan semangat yang tiada henti. Hingga hamba dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. A. Effendi, MM selaku Wakil Dekan I, Prof. Dr. Yulianti, M.S selaku Wakil Dekan II, Drs. Pairul Syah, MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Unila.

5. Bapak Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih bapak selalu mengingatkan penulis, memberikan semangat dan mengajarkan penulis arti perjuangan dan sabar yang sesungguhnya. Terima kasih selama ini sudah bersedia menjadi pembimbing yang sangat sabar dan hebat bagi Ilham, sehat selalu ya pak.
6. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si., selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan ilmu dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas segala pelajaran yang membuat penulis menjadi semangat dalam menghadapi revisi. Pak Denden sehat terus ya pak.
7. Bapak Drs. Yana Ekana PS M.Si selaku dosen pembimbing akademik penulis, terimakasih untuk semua bimbingan dan motivasinya pak, tidak hanya mengajarkan tentang ilmu perkuliahan tetapi juga mengajarkan bagaimana bertahan dalam kesulitan hidup, terimakasih.
8. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih yang setulus-tulusnya atas segala ilmu bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis.
9. Kepala Pemerintah Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton selaku informan penelitian. Bapak Syamsu Nilam, S.H. beserta jajaran, terima kasih banyak atas bantuan yang diberikan kepada penulis..
10. Kedua orang tuaku, Ayahandaku Amigusman, S.H. dan Ibunda Nurlegam yang senantiasa berdoa dan berusaha keras dalam segala keterbatasan untuk menjadikan Penulis sebagai seorang anak yang berpendidikan. Semoga ilmu

yang didapatkan bisa menjadi bekal untuk membahagiakan Ayahanda dan Ibunda serta memberikan manfaat bagi banyak orang.

11. Kakakku Febrika Dersiana, A.Md.Keb., dan kakandaku Samsul Anwar, S.IP.,
Terimakasih untuk keceriaan, dan kebersamaan yang kalian ciptakan ketika sedang mengalami kelelahan dan kepenatan. Semoga kalian bisa melampaui jauh capaian yang telah kakak raih.
12. Ricky Ardian, S.IP.,M.IP., Terimakasih doa, dukungan, kesabaran, motivasi dan waktunya selama ini yang telah membantu dan menemani dalam penulisan skripsi.
13. Temen seperjuangan Alam Patria, S.IP., Ikhwan Efrizal, S.IP., Harizon., dan seluruh teman-teman Ilmu Pemerintahan 2010 atas dukungan dan motivasi serta waktunya selama ini yang telah membantu dan menemani dalam penulisan skripsi.
14. Seluruh teman-teman SD, SMP dan SMA yang berada di Kabupaten Pesisir Barat. Terimakasih untuk motivasi, dan pengalamannya sehingga Penulis menjadi pribadi yang lebih baik.
15. Temen-temen KKN Desa Ramsai Kabupaten Way Kanan: Rizki Indriani, S.E., dr. Sanggiani., Ivan Kurnia, S.E., Renol Rambe, S.T. dan Nona Veronica. S.I.kom., Terimakasih untuk pengalaman, kebersamaan dan motivasinya yang membuat Penulis berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga silaturahmi tetap terjalin .
16. Almamaterku Tercinta, Universitas Lampung.

Penulis berdoa semoga Allah SWT dapat membalas semua kebaikan, bantuan dan doa yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, Desember 2016
Penulis,

Ilham Kurniawan

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi.....	i
Daftar Gambar.....	ii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Kemampuan Aparat Kelurahan.....	8
B. Tugas dan Fungsi Pemerintah Kelurahan	12
C. Konsep Pembangunan.....	14
D. Kerangka Pikir	33
III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	37
B. Fokus Penelitian	37
C. Informan Penelitian.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Teknik Pengolahan Data	40
F. Teknik Analisis Data.....	41
G. Teknik Keabsahan Data	44
IV. GAMBARAN UMUM HASIL PENELITIAN	
A. Geografi.....	49
1. Letak Kelurahan Sepang Jaya	49
2. Sejarah singkat Kelurahan Sepang Jaya.....	50
B. Demografi	51
C. Gambaran umum Pemerintah dan Perangkat Kelurahan Sepang Jaya.....	52
D. Susunan Informan Penelitian.....	53

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	54
1. Tingkat Pendidikan Aparat.....	55
2. Kemampuan Penyelesaian Pekerjaan Sesuai Jadwal	58
3. Kemampuan Melakukan Kerjasama	61
4. Kemampuan Menyesuaikan Diri Terhadap Perubahan yang Dialami Organisasi	68
5. Kemampuan dalam Menyusun Rencana Kegiatan	71
6. Kecepatan dalam Melaksanakan tugas.....	73
7. Tingkat Kreativitas Mencari Tata Kerja yang Terbaik	75
B. Pembahasan.....	78

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir Penelitian	34

DAFTAR TABEL

Gambar	Halaman
1. Aparat Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.....	3
2. Jumlah Penduduk Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung	3
3. Hasil Pembangunan di Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung	4
4. Susunan Organisasi Kelurahan Sepang Jaya	52
5. Susunan Informan Penelitian	53
6. Ringkasan Hasil Penelitian	77

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang multi dimensi secara pengelolaannya melibatkan segenap aparat pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah bahkan sampai ditingkat kelurahan. Komponen atau aparat dimaksud hendaknya memiliki kemampuan yang optimal dalam pelaksanaan tugasnya. Mengingat kompleksnya aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun ditingkat pemerintahan terendah tersebut, maka salah satu aspek yang terlebih dahulu perlu dibangun adalah peningkatan kemampuan aparat pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspek lainnya.

Hal tersebut sangat penting, karena pemerintah kelurahan beserta aparatnya adalah sebagai administrator penyelenggara utama aktifitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun sebagai pembina ketentraman dan ketertiban di wilayah kekuasaannya. Peranan pemerintah kelurahan demikian penting dan banyak menentukan maju mundurnya suatu unit pemerintahan. Oleh sebab itu diperlukan aparat kelurahan yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Keberadaan aparat kelurahan yang juga disertai tugas di bidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, maka input pada pemerintah kecamatan yang menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Suryaningrat (2010:108) mengemukakan bahwa kelurahan sebagai bahan keterangan dan sumber data dan bahan keterangan yang diperoleh dari kelurahan seringkali digunakan untuk rencana daerah oleh karena itu data buatan atau data keterangan harus dihindarkan karena dapat menggagalkan tujuan Negara. Dengan demikian aparat kelurahan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan penyajian data dan informasi yang dibutuhkan, semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan.

Berangkat dari pemikiran tersebut, dikaitkan dengan kondisi riil sementara Aparat Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung sebagai tempat penelitian yang direncanakan ini terdiri dari 6 orang personil yang terdiri dari Lurah, Sekretaris, Kasi Pemerintahan, Kasi Trantib, Kasi Pembangunan dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat, seperti yang dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Aparat Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung

No	Nama	Jabatan
1	Syamsu Nilam, SH	Lurah
2	Heppy	Sekretaris
3	Leniyar, S.I.P	Kasi Pemerintahan
4	Liana Krista Yusufin, SH	Kasi Pembangunan
5	Hamdi Perdana Putra, SH	Kasi Trantib
6	Rosmini	Kasi pemberdayaan masyarakat

Sumber: Profil Kelurahan Sepang Jaya (2015)

Penduduk Kelurahan Sepang Jaya pada tahun 2014 berjumlah 3.701 jiwa dan terdiri dari 854 KK, seperti yang dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung

No	Indikator	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Jumlah Penduduk	3.691 orang	3.701 orang
2	Jumlah Laki-Laki	1.722 orang	1.846 orang
3	Jumlah Perempuan	1.969 orang	1.855 orang
4	Jumlah Kepala Keluarga	846 KK	900 KK

Sumber: Profil Kelurahan Sepang Jaya (2015)

Menurut pengamatan awal penulis, menunjukkan bahwa kemampuan aparat Kelurahan Sepang Jaya dalam pelaksanaan tugas terutama dalam menyiapkan bahan dan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan perencanaan pembangunan, hasilnya masih minim atau belum terlaksana secara optimal. Hal ini terbukti dari pelaksanaan tugas-tugas administrasi yang tidak terlaksana dengan baik dan konsisten sesuai ketentuan, baik administrasi umum, administrasi penduduk, maupun administrasi keuangan. Hal ini dibenarkan oleh Syamsu Nilam SH selaku Lurah Sepang Jaya yang menyatakan bahwa selama ini pembangunan di Kelurahan Kota Sepang dilaksanakan namun karena kurangnya SDM yang berkompeten dalam perencanaan hingga evaluasi pembangunan

(Hasil wawancara tanggal 16 Februari 2016 Pukul 13.45 WIB).

Hasil pembangunan yang ada di Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung selama periode 2014-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Pembangunan di Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung

No	Jenis kegiatan	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Pembuatan gorong-gorong jalan	Dilakukan	-
2	Pengaspalan jalan utama	-	Dilakukan
3	Pengaspalan jalan alternatif	Dilakukan	Dilakukan
4	Rehabilitasi gedung kelurahan	Dilakukan	-

Sumber: Profil Kelurahan Sepang Jaya (2015)

Secara khusus Kelurahan Sepang Jaya merupakan tempat pemukiman penduduk yang dulunya masih berupa kampung atau desa yang terdiri atas lahan sawah yang begitu besar dan kini semakin hari banyak dibangun pemukiman warga, karena lokasi Kelurahan Sepang Jaya tidak begitu jauh dengan pusat kota dan tidak begitu jauh dengan pusat pendidikan yaitu universitas negeri atau universitas swasta.

Belum tersedianya informasi atau pencatatan administrasi secara baik sebagaimana tersebut di atas, maka hal itu terjadi karena adanya pengaruh berbagai faktor, antara lain terutama faktor kemampuan sumber daya aparat kelurahan sebagai penyelenggara yang belum optimal. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang terpenting adalah bagaimana pemerintahan kelurahan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat kelurahan, dan mampu meningkatkan daya saing kelurahannya. Hal tersebut hanya mungkin terwujud apabila urusan

yang menjadi kewenangan kelurahan dapat terlaksana dengan baik. Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam implementasinya terdapat berbagai permasalahan yang langsung maupun tidak langsung menghambat pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis juga telah mengetahui secara nyata berdasarkan observasi dan wawancara penulis dengan Leniyar, S.I.P selaku Kepala Seksi pemerintahan di kantor Kelurahan Sepang Jaya yang menyatakan bahwa selama ini pembangunan fisik yang ada di Kelurahan Kota Sepang telah dilaksanakan namun hasil yang diharapkan belum optimal, seperti pembangunan gorong-gorong di Lingkungan I yang seharusnya selesai selama 1 bulan pada pelaksanaannya mencapai 2 bulan (Hasil wawancara tanggal 16 Februari 2016 Pukul 14.15 WIB).

Kapasitas yang masih rendah merupakan bagian dari permasalahan yang ditunjukkan di lapangan. Diantaranya masih belum optimalnya aspek kelembagaan, sumberdaya manusia, maupun manajemen pemerintahan kelurahan. Pada tahun 2008 Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah, telah melaksanakan Kajian Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan, kajian ini telah menghasilkan cetak biru (blueprint) yang memuat strategi-strategi penyelesaian masalah (*problem solving*) penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan menyusun modul-modul peningkatan kapasitas pemerintahan kelurahan. Lebih lanjut modul-modul tersebut merupakan hasil identifikasi aspek kapasitas yang perlu ditingkatkan yaitu Perencanaan dan Penganggaran

Kelurahan, Keuangan Kelurahan, Penyusunan Kebijakan Kelurahan, Kepemimpinan Lurah dan Manajemen Pelayanan Kelurahan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, menurut penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam. Oleh karena itulah penulis mengajukan penelitian dengan judul: **“Analisis Kemampuan Aparat Pemerintah kelurahan dalam Keberhasilan Pembangunan Fisik (Studi di Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kemampuan aparat pemerintah kelurahan dalam keberhasilan pembangunan fisik di Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kemampuan aparat pemerintah kelurahan dalam keberhasilan pembangunan fisik di Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan sebagai :

1. Bahan informasi dan kontribusi pemikiran kepada pemerintah Kelurahan Sepang Jaya dan masyarakat serta kepada semua pihak yang berkepentingan dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas administrasi kelurahan

dan terutama tugas di bidang pencatatan register yang terpenting bagi kebutuhan pembangunan.

2. Bahan perbandingan dan informasi awal bagi peneliti lain yang hendak mengkaji secara mendalam tentang pelaksanaan tugas-tugas administrasi kelurahan pada umumnya dan register kelurahan pada khususnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kemampuan Aparat Kelurahan

Di dalam kamus bahasa Indonesia, kemampuan berasal dari kata “mampu” yang berarti kuasa (bisa, sanggup, melakukan sesuatu, dapat, berada, kaya, mempunyai harta berlebihan). Kemampuan adalah suatu kesanggupan dalam melakukan sesuatu. Seseorang dikatakan mampu apabila ia bisa melakukan sesuatu yang harus ia lakukan. Sementara itu, menurut Kartono (2009:13) bahwa “kemampuan adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan keterampilan teknik maupun sosial yang dianggap melebihi dari anggota biasa.”

Kemampuan kerja seseorang menurut Tjiptoherianto (2009:36) mengemukakan bahwa "kemampuan kerja yang rendah adalah akibat dari rendahnya tingkat pendidikan, dan latihan yang dimiliki serta rendahnya derajat kesehatan". Sementara itu, menurut Steers dalam (Rasyid, 2010:6) bahwa "kemampuan aparatur pemerintah sebenarnya tidak terlepas dari pembicaraan tingkat kematangan aparatur yang didalamnya menyangkut keterampilan yang diperoleh dari pendidikan latihan dan pengalaman”.

Berdasarkan pandangan tersebut jelas bahwa kemampuan seseorang, dalam hal ini aparat kelurahan dapat dilihat dari tingkat pendidikan aparat, jenis latihan yang pernah diikuti dan pengalaman yang dimilikinya. Secara konseptual hal ini diperkuat dari pandangan Steers tersebut sebelumnya bahwa untuk mengidentifikasi apakah Kegiatan dalam organisasi dapat mencapai tujuannya salah satunya yang harus mendapat perhatian adalah orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut.

Selanjutnya Steers berpendapat bahwa pada kenyataannya anggota organisasi yang merupakan faktor yang mempunyai pengaruh yang paling penting dalam pencapaian tujuan organisasi disebabkan orang-orang itulah yang menggerakkan roda organisasi. Anggota organisasi yang dimaksud adalah aparat kelurahan yang merupakan faktor yang paling menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

Pemerintah Kelurahan memiliki peran signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah kelurahan adalah bagaimana menciptakan kehidupan *demokratik*, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram dan berkeadilan. Guna mewujudkan tugas tersebut, pemerintah kelurahan dituntut untuk melakukan perubahan, baik dari segi kepemimpinan, kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas dan bermakna, sehingga kinerja pemerintah kelurahan benar-benar makin mengarah pada praktek *good local governance*, bukannya *bad governance*.

Peluang untuk menciptakan pemerintahan kelurahan yang berorientasi pada *good local governance* sebenarnya dalam konteks transisi demokrasi seperti yang dialami oleh bangsa Indonesia sekarang terbuka cukup lebar. Hal ini setidaknya didukung oleh kondisi sosial pasca otoritarianisme Orde Baru yang melahirkan liberalisasi politik yang memungkinkan seluruh elemen masyarakat di kelurahan secara bebas mengekspresikan gagasan-gagasan politiknya. Begitu pula dukungan pemerintahan transisi pasca Orde Baru dengan membuat regulasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang sedikit lebih maju dibandingkan dengan regulasi sebelumnya di masa Orde Baru yang syarat dengan penyeragaman dan pengekangan sosial.

Meskipun demikian, adanya perubahan sosial-politik dalam masa transisi demokrasi ini tidak dengan serta merta dapat merubah dalam sekejap wacana dan kinerja pemerintahan kelurahan ke dalam visi demokratisasi dan *good local governance*. Sekalipun strukturnya mengalami perubahan, dimana saat ini pemerintahan kelurahan tidak lagi bercorak korporatis dan sentralistik pada kepemimpinan Lurah, akan tetapi kultur dan tradisi paternalistik yang memposisikan Lurah sebagai orang kuat dan berpengaruh masih begitu melekat dengan kuat. Realitas ini memang tidak dapat dilepaskan sebagai bagian dari proses konstruksi sosial yang begitu mendalam sehingga membuat daya kognitif warga kelurahan seringkali terasa kesulitan dalam membuat terobosan-terobosan baru yang sejalan dengan semangat perubahan ketika berbenturan dengan

kebijakan seorang Lurah.

Kondisi ini sedikit banyak juga dipengaruhi pula oleh lemahnya *human resources* di kelurahan yang populasinya relatif kecil dan sangat terbatas. Sebab itu guna mendobrak kebekuan atau stagnasi sosial ini diperlukan terobosan dari kekuatan luar untuk bermitra atau saling bekerja sama dengan aktor-aktor dan lembaga-lembaga potensial di kelurahan dalam melakukan perubahan sosial menuju ke arah situasi yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya.

Kemampuan atau *ability* sebagai sifat yang dibawa lahir atau dipelajari yang memungkinkan seseorang melakukan sesuatu yang bersifat mental atau fisik, sedangkan *skill* atau ketrampilan adalah kecakapan yang berhubungan dengan tugas. Berkaitan dalam hal kualitas pelayanan publik, maka kemampuan aparat sangat berperan penting dalam hal ikut menentukan kualitas pelayanan publik tersebut (Soetopo, 2009:82). Untuk itu indikator-indikator dalam kemampuan aparat adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat pendidikan aparat.
- b. Kemampuan penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal.
- c. Kemampuan melakukan kerjasama.
- d. Kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang dialami organisasi.
- e. Kemampuan dalam menyusun rencana kegiatan. .
- f. Kecepatan dalam melaksanakan tugas. .
- g. Tingkat kreativitas mencari tata kerja yang terbaik.

- h. Tingkat kemampuan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada atasan.
- i. Tingkat keikutsertaan dalam pelatihan/kursus yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

B. Tugas dan Fungsi Pemerintah Kelurahan

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul camat dari Pegawai Negeri Sipil.

1. Kedudukan dan Tugas Pokok Kelurahan

a. Ketentuan Umum

- 1) Lurah adalah Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- 2) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 3) Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati/Walikota.
- 4) Urusan pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- 5) Pelimpahan urusan pemerintahan disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- 6) Pelimpahan urusan pemerintahan ditetapkan dalam peraturan

Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan Menteri.

b. Tugas Pokok

- 1) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan.
- 2) Pemberdayaan masyarakat.
- 3) Pelayanan Masyarakat.
- 4) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- 5) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- 6) Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

2. Struktur Organisasi

- a. Kelurahan terdiri dari Lurah dan Perangkat Lurah.
- b. Perangkat Kelurahan terdiri dari Sekretaris Lurah dan Seksi sebanyak- banyaknya 4 (empat) seksi serta jabatan fungsional.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Kelurahan bertanggung jawab kepada Lurah. Perangkat Kelurahan diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas usul camat.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja kelurahan diatur dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota.
- e. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lurah melakukan koordinasi dengan camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.
- f. Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

masing-masing.

- g. Setiap pimpinan satuan kerja di kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

Mengingat unit pemerintahan kelurahan adalah bagian integral dari pemerintahan nasional, maka pembahasan tentang tugas dan fungsi pemerintah kelurahan tidak terlepas dari tugas dan fungsi pemerintahan nasional seperti yang telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 127 tentang tugas pokok Lurah yaitu :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b. Pemberdayaan masyarakat
- c. Pelayanan masyarakat
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

Menurut Zainun (2009:3-5) terdapat empat kunci pokok tugas dan fungsi administrasi dan manajemen pemerintahan Indonesia yaitu :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan umum,
- b. Kepemimpinan,
- c. Pengawasan,
- d. Koordinasi.

Keempat fungsi administrasi dan manajemen ini akan diterapkan pada setiap tingkat pemerintahan yang ada dalam susunan pemerintahan negara Republik

Indonesia. Berdasarkan tugas fungsi pemerintahan tersebut, berarti pemerintah kelurahan sebagai bagian integral dari pemerintahan nasional juga menyelenggarakan fungsi-fungsi tersebut meskipun dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Oleh unit pemerintahan kelurahan seperti halnya pemerintah kelurahan sebagai unit pemerintahan terendah mempunyai 3 fungsi pokok yaitu :

- a. Pelayanan kepada masyarakat
- b. Fungsi operasional atau manajemen pembangunan,
- c. Fungsi ketatausahaan atau registrasi (Sawe, 2009:99)

Keseluruhan tugas dan fungsi administrasi pemerintah kelurahan tersebut, tidak akan terlaksana dengan baik, manakala tidak ditunjang dari aparatnya dengan melaksanakan sebaik-baiknya apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing aparat. Menyadari betapa pentingnya tugas administrasi pemerintahan kelurahan, maka yang menjadi keharusan bagi Lurah dan aparatnya adalah berusaha untuk mengembangkan kecakapan dan keterampilan mengelola organisasi pemerintahan kelurahan termasuk kemampuannya untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Selanjutnya menurut Beratha (2010:37) mengemukakan bahwa tugas pemerintah kelurahan termasuk dalam menjalankan administrasi adalah :

- a. Tugas bidang pemerintahan
- b. Tugas bidang pelayanan Kepala masyarakat.
- c. Tugas bidang ketatausahaan.

C. Konsep Pembangunan

1. Definisi Pembangunan

Definisi pembangunan merupakan upaya yang sistematis dan berkesinambungan atau berkelanjutan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik (Anwar 2005: 59).

Salah satu titik berat bagi pembangunan nasional adalah wilayah pedesaan dengan berbagai kenyamanan dan daya tarik tersendiri. Kemiskinan dan ketidakmampuan masyarakat pedesaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan mereka. Hal ini merupakan salah satu kegagalan kebijakan pemerintah dimasa lalu karena seringkali kebijakan yang ditempuh tidak sesuai dengan kondisi ekosistem wilayah, keinginan serta nilai-nilai kehidupan yang dianut oleh masyarakat.

Kebijakan pemerintah tersebut hanya didasarkan kepada tujuan meningkatkan kapital dan kepentingan segolongan tertentu saja yang merugikan golongan masyarakat yang lain, tidak memperhatikan keberagaman wilayah yang ada serta tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Seharusnya keberagaman potensi wilayah baik kondisi biofisik wilayah, kemampuan sumberdaya alam, pertumbuhan penduduk, dan akses ke pasar yang berbeda menghendaki perlakuan ataupun kebijakan yang berbeda pula yang sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya. Kesalahan dalam pengaturan dan perancangan

program-program pembangunan menyebabkan kegagalan proses pembangunan itu sendiri.

Keragaman wilayah pedesaan di Indonesia tergantung kepada tipologinya yang bervariasi, kebijakan pertanian dan pedesaan tidak dapat dilakukan secara seragam untuk semua keadaan wilayah yang masing-masing memiliki kekhasan dan sifat-sifat khusus yang berbeda satu dengan yang lain, sehingga setiap kebijakan harus memperhatikan kondisi perkembangan dari wilayah yang bersangkutan yang secara konseptual tergantung kepada akses pasar dan biaya-biaya transaksi (Anwar, 2005: 79).

Kesenjangan spasial yang terjadi antar wilayah perkotaan yang bercorak industri dan jasa dengan wilayah pedesaan yang di dominasi oleh sektor pertanian. Maka diperlukan terobosan dalam menyeimbangkan pembangunan yang berdampak pada pembangunan infrastruktur (fisik) desa, dan perekonomian rakyat pedesaan (non fisik).

Suatu konsep pembangunan untuk mengurangi ketimpangan spasial tersebut dengan menyeimbangkan pembangunan-kota yang dilakukan secara terpadu. Keseimbangan spasial tersebut dapat tercapai apabila dalam perencanaan pembangunan pedesaan memperhatikan berbagai faktor yang terkait dan pembangunan diarahkan untuk mencapai tujuan: (1) pemerataan, (2) pertumbuhan, (3) keterkaitan, (4) keberimbangan, (5) kemandirian, dan (6) keberlanjutan (Wresniwiro, 2007: 78).

Keterpaduan tujuan pembangunan tersebut dalam perencanaan dan proses pembangunan akan meningkatkan produktifitas daerah pedesaan dengan berpegang pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keutamaan yang dianut masyarakat. Pembangunan bukanlah kegiatan pada ruang kosong tetapi kegiatan yang dilakukan pada tempat dimana sejumlah penduduk yang memiliki nilai-nilai tertentu menjadi obyek dan sekaligus sebagai subyek pembangunan.

Sehingga nilai-nilai keutamaan yang dianut masyarakat, organisasi swadaya dan pengelolaan sumberdaya yang bersifat swadaya hendaknya menjadi landasan penyelenggaraan pembangunan.

Pendekatan pembangunan ke wilayah pedesaan harus dilakukan tidak hanya kegiatan fisik saja (infrastruktur), melainkan yang lebih penting sebagai entry point-nya adalah kegiatan ekonomi (non fisik) berdasarkan pada potensi unggulan dimasing-masing wilayah, sehingga kesejahteraan rakyat pedesaan dapat segera terwujud.

Sebab kunci dari pembangunan yaitu kurangnya masyarakat yang masih tergolong kurang sejahtera dibidang perekonomian, dimana hal itu dikategorikan sebagai rakyat miskin. Dikarenakan prekenomian rakyat yang tidak memenuhi kebutuhan hidup dari segi sandang, pangan, papan. Dimana sebagaian orang terkadang pembangunan diartikan adanya gedung megah.

Padahal pembangunan itu ada dua segi yaitu pembangunan fisik dan non fisik (Wresniwiro, 2007: 47).

2. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan adalah intervensi pada rangkaian kejadian-kejadian sosial kemasyarakatan dengan maksud untuk memperbaiki rangkaian kejadian dan aktivitas yang ada dengan maksud: (a) meningkatkan efesiensi dan rasionalitas, (b) meningkatkan peran kelembagaan dan profesionalitas dan (c) merubah atau memperluas pilihan-pilihan untuk menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi seluruh warga masyarakat (Sirojuzilam dan Mahalli, 2010).

Berdasarkan aspek substansi, perencanaan adalah penetapan tujuan dan penetapan alternatif tindakan, selengkapnya sebagai berikut: Perencanaan ini pada dasarnya berkisar kepada dua hal, yang pertama, ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan tujuan tersebut (Tjokroamidojo, 2003: 78).

Perencanaan wilayah mencakup berbagai segi kehidupan yang komprehensif dan satu sama lain saling bersentuhan, yang semuanya bermuara pada upaya meningkatkan kehidupan masyarakat. Perencanaan wilayah diharapkan akan dapat menciptakan sinergi bagi memperkuat posisi pengembangan dan

pembangunan wilayah (Miraza, 2005: 114).

Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi:

- a. Perencanaan jangka panjang, biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Perencanaan jangka panjang adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang.
- b. Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 sampai 6 tahun. Dalam perencanaan jangka menengah walaupun masih umum, tetapi sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat diproyeksikan dengan jelas.
- c. Perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu 1 tahun, biasanya disebut juga rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih akurat (Munir, 2002: 47).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan tentang perencanaan pembangunan daerah tahunan dapat diartikan sebagai proses penyusunan rencana yang mempunyai rentang waktu satu tahun yang merupakan rencana operasional dari rencana jangka panjang dan menengah yang berisi langkah-langkah penetapan tujuan serta pemilihan kebijakan/program/kegiatan untuk menjawab kebutuhan masyarakat setempat.

Struktur politik di daerah (kabupaten/kota) tercermin dalam bentuk pemerintahan daerah otonom. Pemerintahan daerah otonom adalah pemerintahan daerah yang badan pemerintahannya dipilih oleh penduduk (masyarakat) setempat dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Fungsi mengatur dilakukan oleh pejabat yang dipilih melalui pemilu, sedangkan fungsi mengurus dilakukan oleh pejabat yang diangkat/birokrat lokal. Aktor yang terlibat terdiri dari pemerintah daerah terdiri *Elected Official*/Pejabat Politik (Kepala Daerah dan DPRD) dan *Appointed Official* (Birokrasi) (Nurcholis, 2005: 114).

Kepala Daerah adalah pemimpin birokrasi daerah yang tugasnya menetapkan kebijakan bersama dengan DPRD serta memimpin pelaksanaannya bersama dengan jajaran birokrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kepala daerah berkewajiban antara lain: (1) menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan, (2) meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat, (3) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, (4) mengajukan rancangan peraturan daerah dan menetapkannya sebagai peraturan daerah bersama dengan DPRD.

Kepala Daerah ini berperan sebagai *top manager*, *top manager* bertanggungjawab terhadap perusahaan (pemerintah daerah) secara keseluruhan, dengan tugas utama yaitu menetapkan tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan secara umum, yang kemudian akan diterjemahkan lebih

spesifik oleh manajer di bawahnya. *Top manager* lebih berperan dalam merumuskan perencanaan strategis, sedangkan birokrasi lebih berperan dalam perencanaan operasional. Legislatif adalah forum yang sangat penting dimana masalah masyarakat dan kebijakan di alamatkan kepadanya untuk diminta. Sebagian besar kebijakan yang dipersiapkan oleh eksekutif terutama yang bersifat makro atau mempunyai dampak bagi masyarakat, membutuhkan pengesahan dari legislatif (Amirullah, 2004).

Berdasarkan aktor yang melakukan proses penyusunan perencanaan pembangunan, dibedakannya dalam beberapa model yaitu:

1) *Technical Bureaucratic Planning*

Perencanaan ini berbasis kepada penilaian birokrasi atas alternatif yang terbaik untuk mencapai tujuan dengan mengembangkan analisis komparatif serta proyeksi, untuk membuat suatu rekomendasi bagi pengambil keputusan berdasarkan informasi dan penilaian atas dampak politik dan perubahan yang dikehendaki.

2) *Political Influence Planning*

Dalam model ini, perencana adalah elit pimpinan daerah atau anggota legislatif yang terpilih. Perencanaan berbasis pada aspirasi/harapan dari masing-masing kontituennya.

3) *Social Movement Planning*

Perencanaan disusun berdasarkan pergerakan masyarakat dimana di dalamnya terdapat individu atau kelompok yang secara struktur tidak

mempunyai kekuatan, bergabung bersama dengan tujuan yang sama.

4) *Collaborative Planning*

Dalam model ini setiap partisipan bergabung untuk mengembangkan misi dan tujuannya, menyampaikan kepentingannya untuk diketahui bersama, mengembangkan saling pengertian atas masalah dan perjanjian yang mereka butuhkan, dan kemudian bekerja melalui serangkaian tugas yang diperjanjikan bersama untuk mencapai kesejahteraan bersama (Innes, 2006: 47).

3. Alur Perencanaan Pembangunan

Model perencanaan yang rasional terdiri dari 6 (enam) langkah, sebagai berikut:

a. *Determination of goals*

Tujuan merupakan ungkapan dari suatu nilai yang dikaitkan dengan suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai. Sumber tujuan biasanya dari Konstitusi atau Undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. *Assessment of needs*

Kebutuhan adalah permintaan untuk menuju keadaan yang lebih baik. Penilaian kebutuhan adalah suatu penentuan ukuran kondisi yang terjadi di masyarakat, dimana diharapkan para pembuat keputusan dapat memperbaiki atau memenuhinya.

c. *Specification of objectives*

Dalam langkah ini adalah menetapkan sasaran atau hasil yang akan

dicapai/dapat diukur yang merupakan suatu definisi operasional dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

d. Design of alternative actions

Langkah ini untuk mengidentifikasi atau merancang beberapa alternative tindakan yang ingin diambil oleh para pengambil keputusan untuk dapat mencapai suatu sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

e. Estimation of consequences of alternative actions

Langkah ini berisi analisis atas alternatif tindakan yang telah diidentifikasi atau dirancang di atas untuk dapat diketahui kekuatan atau kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan.

f. Selection of course of action

Dalam langkah ini adalah pemilihan tindakan untuk mencapai sasaran yang dilakukan oleh para pengambil keputusan berdasarkan pertimbangan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan (Mayer, 2009: 78).

Perencanaan erat kaitannya dengan pembuatan kebijakan (*policy making*). Bahkan keduanya sering dapat dipertukarkan. Menurut Mayer perbedaan tersebut lebih disebabkan karena perkembangan historis dari literatur dan bukan dalam arti yang melekat pada istilah (Mayer, 2009: 78).

Proses perencanaan dibagi dalam beberapa tahap (a) perumusan masalah, (b) penyusunan agenda (*agenda setting*), (c) perumusan usulan, (d)

pengesahan kebijakan, (e) pelaksanaan kebijakan, dan (f) penilaian kebijakan (Islamy, 2003: 78).

a. Perumusan Masalah

Masalah tidak dapat terumuskan dengan sendirinya. Para pembuat kebijakan harus mencari dan menentukan identitas masalah yang berupa pendapat-pendapat atau keinginan anggota masyarakat, sehingga kemudian dapat merumuskan masalah kebijakan tersebut dengan benar (Dimock dalam Sunarko, 2006: 47).

Tidak semua permasalahan akan dipilih untuk diselesaikan. Untuk dapat memilih masalah mana yang akan diselesaikan diperlukan langkah-langkah perumusan masalah adalah: (1) Mengidentifikasi masalah. Masalah merupakan kebutuhan-kebutuhan manusia yang harus di atasi/dipecahkan (2) Mengidentifikasi masalah umum. Masalah Umum atau problema publik adalah kebutuhan-kebutuhan atau ketidakpuasan-ketidakpuasan manusia yang tidak dapat dipenuhi atau di atasi secara pribadi serta mempunyai akibat yang luas kepada masyarakat (3) Mengidentifikasi Isu. Isu adalah masalah yang dapat membangkitkan orang banyak untuk melakukan tindakan terhadap masalah-masalah itu (Islamy, 2003: 78).

Untuk dapat merumuskan masalah tersebut dibutuhkan kemampuan-kemampuan para aktor yang meliputi: (a) kesadaran dan kepekaan

masyarakat untuk melihat problemnya sendiri, (b) kesadaran, kepekaan dan kemampuan pembuat keputusan melihat problem yang dihadapi masyarakat sebagai sesuatu yang menjadi tanggungjawabnya untuk di atasi (Islamy, 2003: 78).

b. Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Isu dapat masuk ke dalam pengambil keputusan melalui dua agenda yaitu: (1) *Systemic Agenda*, mencakup seluruh isu yang sedang dibicarakan secara luas, yang diharapkan dapat diselesaikan oleh pemerintah (2) *Institutional Agenda*, bahwa isu tersebut sudah menjadi diterima oleh pengambil keputusan dan sedang dirumuskan cara pemecahannya (Lester, 2006).

Pengelolaan isu meliputi: (a) *Outside initiation model*. Isu berasal dari luar pemerintah, yang kemudian dikembangkan ke dalam *systemic agenda* dan akhirnya masuk dalam *institutional agenda*. Dalam tipe ini peran kunci dipegang oleh kelompok sosial (b) *Mobilization model*. Dalam model ini inisiatif berasal dari pemerintah, namun pemerintah meminta dukungan dari masyarakat. Isu masuk dulu ke *institutional agenda*, baru kemudian ke *systemic agenda* (c) *Inside initiation model*. Inisiatif berasal dari pemerintah, dan langsung dimasukkan dalam *institutional agenda* (Howlett, 2005: 114).

c. Perumusan Usulan Kebijakan (*Policy Proposals*)

Perumusan usulan kebijakan adalah kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah. Langkah-langkah dalam kegiatan ini berupa (1) mengidentifikasi alternatif, (2) mendefinisikan dan merumuskan alternatif, (3) menilai alternatif, (4) memilih alternatif yang memuaskan (Islamy, 2003: 78).

Langkah-langkah yang disampaikan Islamy di atas adalah model rasional komprehensif. Model lainnya adalah inkremental yang ditempuh apabila ada keterbatasan waktu, biaya dan informasi yang dimiliki. Model ini bersifat upaya untuk memodifikasi terhadap program-program yang sudah ada. (Solichin, 2004: 45).

d. Pengesahan Kebijakan (*Policy Legitimation*)

Usulan kebijakan akan menjadi kebijakan (*policy decision*) yang sah bila sudah diadopsi atau diberi legitimasi oleh seseorang atau badan yang berwenang yang biasanya dilakukan oleh pihak legislatif. Rencana pembangunan supaya mendapatkan kekuatan dalam pelaksanaannya perlu mendapat status formal atau dasar hukum tertentu.

Tiga pola tersebut adalah: (1) Pola pertama, perencanaan pembangunan dilakukan pembahasan serta harus disahkan melalui suatu keputusan lembaga perwakilan rakyat, biarpun penyusunannya tentu saja dilakukan

oleh badan-badan perencanaan yang bersifat teknis (2) Pola kedua, perencanaan pembangunan lebih merupakan suatu kebijakan pemerintah saja (3) Pola ketiga, garis-garis besar kebijakan dasar suatu rencana pembangunan disetujui dan ditetapkan oleh lembaga perwakilan, sedangkan kebijakan dan program-program pembangunan selanjutnya menjadi keputusan pemerintah.

Memperhatikan pedoman-pedoman perencanaan pembangunan yang dikeluarkan oleh Bappenas, ada lima tahapan yaitu (a) penyusunan kebijakan (b) penyusunan program (c) penyusunan pembiayaan (d) pemantauan dan evaluasi kinerja (e) penyempurnaan program. Untuk langkah (d) dan (e) bukan merupakan tahapan perencanaan. Selengkapny proses penyusunan perencanaan pembangunan yaitu:

a) Penyusunan Kebijakan

Penyusunan kebijakan meliputi tahapan pengkajian kebijakan dan perumusan kebijakan yang terdiri dari unsur-unsur: (1) Tinjauan keadaan, (2) Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana, (3) Penetapan tujuan rencana (plan objectives) dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana, (4) Identifikasi kebijakan dan atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan, (5) Persetujuan rencana.

b) Penyusunan Program

Dalam tahap ini dilakukan perumusan yang lebih terperinci untuk mengimplementasikan tujuan dan kebijakan yang telah

ditetapkan dalam penetapan kebijakan. Rencana pembangunan diklasifikasikan ke dalam berbagai program dengan menetapkan: tujuan program, sasaran program, dan kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan. Perumusan program dan kegiatan disebut pemrograman yaitu suatu rencana tahunan yang berisi langkah-langkah strategik (kegiatan) yang dipilih untuk mewujudkan tujuan strategik yang tergambar dalam sasaran beserta taksiran sumberdaya (SDM, biaya, peralatan dsb) yang diperlukan untuk itu. Karena program berisi kegiatan sehingga program dapat diartikan sekumpulan kegiatan yang direncanakan untuk merealisasikan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

c) Penyusunan Pembiayaan/Penyusunan Anggaran

Dalam proses penyusunan pembiayaan, direncanakan sumber pendanaan untuk melaksanakan program pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi, desentralisasi atau tugas pembantuan. Asas efisiensi dan efektivitas menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan prioritas pembiayaan, sehingga perlu didukung dengan standar-standar harga satuan pokok untuk komponen-komponen pembiayaan. Penyusunan pembiayaan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Abdullah (2005: 114) anggaran adalah proses penjabaran rencana ke dalam angka kuantitatif (uang) yang disusun dalam secara sistematis dalam perkiraan pendapatan, belanja (dan pembiayaan), sedangkan

Governmental Accounting Standards Board (GASB) mendefinisikan anggaran sebagai rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu (Bastian, 2010: 94).

Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja yang akan berfungsi sebagai dasar melaksanakan program/kegiatan serta sebagai alat pengendalian. Tahap-tahap penyusunan anggaran meliputi: (1) Penyusunan anggaran satuan kerja berdasarkan usulan program/kegiatan, (2) Penyusunan rancangan APBD, (3) Pengajuan rancangan APBD oleh kepala daerah kepada DPRD, (4) Penetapan APBD (Kepmendagri 29/2002).

Namun sebelum terjadi proses penganggaran berbentuk menjadi kegiatan yang siap dilaksanakan dari penyusunan anggaran satuan kerja sampai dengan penetapan anggaran, terdapat proses yang tidak dapat dipisahkan yaitu adanya musyawarah perencanaan pembangunan dari tingkat kelurahan, diteruskan ke tingkat kecamatan dan akhirnya di tingkat kota.

Berdasarkan beberapa bahasan di atas dapat disimpulkan bahwa alur perencanaan pembangunan daerah terdiri dari tahap-tahap:

a. *Penyusunan Agenda Setting*

Local Development Planning menyebutkannya sebagai *local policy statement* yang merupakan pengejawantahan dari kewenangan politik yang berfungsi memberikan arah tindakan yang bertujuan, yang

dilaksanakan oleh pelaku atau kelompok pelaku di dalam mengatasi suatu masalah atau urusan-urusan yang bersangkutan. Langkah-langkah penetapan kebijakan yaitu (1) tinjauan keadaan dan perumusan masalah (2) penetapan tujuan, (3) penetapan arah kebijakan yang berisi cara-cara/strategi yang bersifat indikatif (GTZ, 2006: 47).

b. Penyusunan *policy formulation*

Sebagai *local development program* yang merupakan pengejawantahan dari kewenangan administratif sebagai pelaksanaan dari kebijakan (*agenda setting*) yang telah ditetapkan. Langkah-langkah (1) penentuan tujuan program dengan mengacu kepada *local policy statement* (2) Penilaian atas kebutuhan (3) Penentuan sasaran program (4) penentuan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Penyusunan program tetap berpedoman kepada asas prioritas (GTZ, 2006: 47).

c. Penyusunan *Budgeting*

Anggaran adalah proses penjabaran rencana kerja ke dalam angka kuantitatif yang berfungsi sebagai dasar melaksanakan program/kegiatan serta sebagai alat pengendalian (GTZ, 2006: 47).

4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Menurut Peraturan Bersama: Menteri Dalam Negeri Nomor: 28 Tahun 2010, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 0199/M PPN/04/2010 dan Menteri Keuangan Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

5. Kualitas Perencanaan Pembangunan

Kualitas perencanaan yaitu: (a) Kualitas adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen (b) Kualitas adalah nihil cacat, kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan, (c) Kualitas adalah kesesuaian dengan spesifikasi. Tujuan mengidentifikasikan lima pendekatan perspektif kualitas yaitu: (a) *Transcendental Approach*, adalah sesuatu yang dapat dirasakan, tetapi sulit didefinisikan dan dioperasionalkan maupun diukur (b) *Product Based Approach*, adalah suatu karakteristik atau atribut yang dapat diukur, (c) *User Based Approach*, adalah kualitas tergantung pada orang yang memandangnya, dan produk yang paling memuaskan preferensi seseorang atau cocok dengan selera (*fitness for used*) merupakan produk yang berkualitas paling tinggi (d) *Manufacturing Based Approach*, adalah bersifat *supply based* atau dari sudut pandang produsen yang mendefinisikan kualitas sebagai sesuatu yang sesuai dengan persyaratan dan prosedur (Yamit, 2010: 94).

Untuk mengukur kualitas rencana Isi, proses dan konteks merupakan parameter yang sering digunakan untuk mengukur kualitas suatu rencana strategis. Suatu rencana dapat dianggap berkualitas baik apabila isi dari dokumen tersebut menggambarkan aspirasi dan kehendak para *stake holders* nya, kualitas dokumen itu juga dapat dinilai dari proses yang ditempuh atau metode yang digunakan apakah sesuai dengan prosedur keilmuan yang ada (Keban, 2010: 94).

Perencanaan yang ideal harus memenuhi: (a) prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya, (b) prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap. tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran, (c) prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan, (d) mengandung sistem yang dapat berkembang (*a learning and adaptive system*), (e) terbuka dan demokratis (*a pluralistic social setting*) (Solihin, 2008: 45).

Syarat perencanaan harus: (a) faktual dan realistis, yang mengacu kepada dinamika yang ada (b) logis dan rasional, yaitu perencanaan yang masuk akal dan dapat dimengerti, (c) fleksibel, yaitu rencana yang luwes dengan memperhatikan kendala dan limitasi lingkungan sosial maupun fisik, (d)

objektif, yaitu memenuhi komitmen terhadap kepentingan umum (e) komprehensif atau menyeluruh (Solihin, 2008: 45).

Pembaharuan sistem perencanaan pembangunan nasional perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan pokok dalam manajemen pembangunan, antara lain:

- 1) Adanya inkonsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan.
- 2) Rendahnya tingkat keterlibatan aktor berkepentingan dalam perumusan kebijakan.
- 3) Ketidakselarasan antara perencanaan program dan pembiayaan.
- 4) Rendahnya tingkat transparansi proses perumusan kebijakan dan perencanaan program, dan tingkat akuntabilitas pemanfaatan sumberdaya keuangan publik.
- 5) Kurang efektifnya penilaian kinerja kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan itu sendiri (Bappenas, 2003: 78).

Koordinasi perencanaan pembangunan pada tingkat Kabupaten/Kota melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota. Koordinasi ini bertujuan untuk membahas rancangan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) sebagai arah kebijakan umum APBD/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota dengan

mengacu pada: Program Pembangunan Daerah (Propeda). Rencana Strategis Daerah (Renstrada). dan RKPD kabupaten/kota tahun-tahun sebelumnya, serta hasil pengawasan pelaksanaan program. Untuk keperluan koordinasi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum (PU) atau badan/lembaga yang membidangi perencanaan di daerah bersama-sama dengan SKPD menyiapkan RKPD Kabupaten/Kota (Bappenas, 2003: 78).

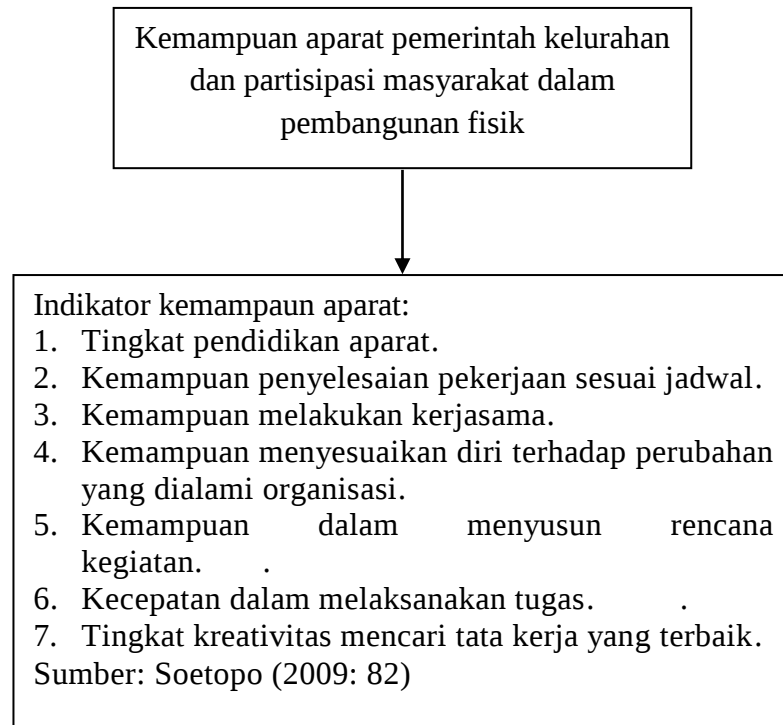
Kualitas RKPD menunjukkan kinerja tenaga perencana pada masing-masing SKPD. Berdasarkan pedoman koordinasi pembangunan nasional disebutkan bahwa dalam penetapan tujuan rencana pelayanan perlu berpegang pada prinsip SMART, yaitu:

- a. Tujuan harus bersifat khusus, spesifik (*specific*)
- b. Tujuan tersebut harus terukur (*measurement*)
- c. Tujuan tersebut harus mungkin dan dapat dicapai (*achievable*)
- d. Tujuan tersebut harus realistik, rasional dan logis (*realistic*)
- e. Tujuan harus mempunyai rentang waktu untuk dicapai (*timely*) (Bappenas, 2003: 78)

D. Kerangka Pikir

Steers berpendapat bahwa pada kenyataannya anggota organisasi yang merupakan faktor yang mempunyai pengaruh yang paling penting dalam pencapaian tujuan organisasi disebabkan orang-orang itulah yang menggerakkan roda organisasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disusun kerangka pikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pikir Penelitian

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah penelitian deskriptif, tujuan dari penelitian deskriptif adalah mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan aparat pemerintah kelurahan dalam keberhasilan pembangunan fisik di Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini penulis menyusun panduan wawancara yang akan digunakan sebagai alat pengumpul data serta dokumen lain yang terkait dengan fokus penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah kemampuan aparat pemerintah kelurahan dalam keberhasilan pembangunan fisik di Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung terdiri dari:

1. Tingkat pendidikan aparat.
2. Kemampuan penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal.
3. Kemampuan melakukan kerjasama.
4. Kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang dialami organisasi.
5. Kemampuan dalam menyusun rencana kegiatan. .
6. Kecepatan dalam melaksanakan tugas. .
7. Tingkat kreativitas mencari tata kerja yang terbaik.

Berdasarkan 7 indikator tersebut, maka fokus penelitian ini melihat kemampuan aparat pemerintah kelurahan dalam keberhasilan pembangunan fisik di Kelurahan Sepang Jaya berdasarkan tingkat pendidikan yaitu:

1. Kemampuan penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal.
2. Kemampuan melakukan kerjasama.
3. Kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang dialami organisasi.
4. Kemampuan dalam menyusun rencana kegiatan. .
5. Kecepatan dalam melaksanakan tugas. .
6. Tingkat kreativitas mencari tata kerja yang terbaik.

C. Informan Penelitian

Dalam wawancara terdapat dua aktor yang melakukan wawancara. Sebagai penanya disebut pewawancara, sedangkan yang diwawancarai dan yang dimintai

informasi disebut informan. Di dalam Suyanto dan Sutinah (2011: 171-172), yang dimaksud dengan informan kunci (*key informan*) adalah orang yang memberi informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan dalam penelitian ini diwakili oleh Lurah Sepang Jaya, Sekretaris Kelurahan Sepang Jaya, Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan dan Kepala Seksi Trantib serta perwakilan masyarakat Kelurahan Sepang Jaya sebanyak 5 orang, jadi jumlah informan yang akan dilakukan wawancara sebanyak 8 orang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)

Wawancara mendalam dalam penelitian ini dilakukan dengan jalan mewawancarai narasumber penelitian dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada sumber informasi dengan menggunakan panduan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap:

- a. Syamsu Nilam, SH selaku Lurah Sepang Jaya
- b. Heppy selaku Sekretaris Kelurahan Sepang Jaya
- c. Liana Krista Yusufin, SH selaku Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan
- d. Hamdi Perdana Putra, SH Kasi Trantib
- e. Perwakilan masyarakat Kelurahan Sepang Jaya sebanyak 5 orang

Penelitian melakukan wawancara dengan masing-masing informan untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai kemampuan aparat

pemerintah kelurahan dalam keberhasilan pembangunan fisik di Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung

2. Dokumentasi

Pada penelitian peneliti mengumpulkan data monografi kelurahan, foto hasil penelitian dan berita-berita mengenai pembangunan fisik di Kelurahan Sepang Jaya dari media massa. Pada pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi ini peneliti melakukan pengumpulan data berupa data monografi kelurahan dan foto-foto hasil kegiatan pembangunan fisik di Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

3. Observasi

Observasi digunakan untuk memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan secara sistematis pada obyek penelitian. Pengamatan langsung di lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi dan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian.

E. Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul maka tahap berikutnya ialah mengolah data tersebut. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data sebagaimana yang disebutkan Maleong (2008: 38). adalah:

1. *Editing*

Pada tahap *editing* peneliti menyajikan hasil wawancara dan observasi berupa kalimat-kalimat yang kurang baku disajikan dengan menggunakan kalimat baku dan bahasa yang mudah dipahami. Selain itu peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil-hasil yang sesuai atau relevan dijadikan sebagai bahan bahasan dalam penelitian.

2. *Interpretasi*

Interpretasi yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pembahasan hasil penelitian mengenai kemampuan aparat pemerintah kelurahan dalam keberhasilan pembangunan fisik di Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung yang dikembangkan oleh peneliti. Pada kegiatan interpretasi ini peneliti melakukan analisis hasil penelitian berdasarkan wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil tersebut dibuat secara sistematis mulai dari penyajian data, analisis data penelitian dan teori penunjang dari hasil penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Fenomena yang diteliti secara

deskriptif tersebut dicari informasi mengenai hal-hal yang dianggap mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.

Analisis data merupakan proses memanipulasi data hasil penelitian sehingga data tersebut dapat menjawab pertanyaan penelitian/proses menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan (Purwanto dan Sulistyastuti, 2007:93).

Terdapat tiga komponen analisis yaitu:

1. Reduksi data

Yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan (Milles dan Huberman, 2009:16).

Reduksi data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data mengenai kemampuan aparat pemerintah kelurahan dalam keberhasilan pembangunan fisik di Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data terasa sesudah penelitian di lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Pada pengumpulan data terjadilah tahapan reduksi selanjutnya yaitu membuat ringkasan mengenai penelitian ini. Reduksi data sebagai proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian-penyajian data yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk teks naratif, berbagai jenis matrik, grafik dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk padu dan mudah diraih (Milles dan Huberman, 2009:16).

Pada penelitian ini penyajian data yang digunakan adalah bentuk teks naratif yang disertai bagan dan tabel yang isinya berkaitan dengan penelitian ini tentunya.

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Berdasarkan permulaan pengumpulan data, penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola kejelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Penelitian yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, kemudian lebih rinci dan mengakar dengan kokoh dan kesimpulan akhir mungkin muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada kesimpulan-kesimpulan catatan lapangan, pengodeannya, penyimpanan, metode pencairan ulang yang digunakan dan kecakapan peneliti (Milles dan Huberman, 2009:16).

Penulis melakukan verifikasi yaitu melakukan pengumpulan data-data mengenai kemampuan aparat pemerintah kelurahan dalam keberhasilan pembangunan fisik di Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung kemudian membuat kesimpulan, kesimpulan awal mula-mula mungkin belum jelas namun setelah itu akan semakin rinci dan mengakar dengan kokoh pada permasalahan penelitian yang dibahas.

G. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dimaksud untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian, mengungkapkan dan memperjelas data dengan fakta-fakta aktual di lapangan. Dalam penelitian kualitatif keabsahan data lebih bersifat sejalan seiring dengan proses penelitian itu berlangsung. Keabsahan data kualitatif harus dilakukan sejak awal pengambilan data, yaitu sejak melakukan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Afifuddin, 2012: 159)

Untuk memperoleh keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara menjaga kredibilitas, transferabilitas dan dependabilitas yang maksudnya adalah:

1. Validitas internal (Kredibilitas)

Validitas internal merupakan ukuran tentang kebenaran data yang diperoleh dengan instrumen, yakni apakah instrumen itu sungguh-sungguh mengukur variabel yang sesungguhnya. Bila ternyata instrumen tidak mengukur apa

yang seharusnya diukur maka data yang diperoleh tidak sesuai dengan kebenaran, sehingga hasil penelitiannya juga tidak dapat dipercaya, atau dengan kata lain tidak memenuhi syarat validitas.

Menurut Nasution (2006:114), validitas internal (kredibilitas) dapat dilakukan dengan: a). Memperpanjang masa observasi, b). Melakukan pengamatan terus menerus, c). Trianggulasi data, d). Membicarakan dengan orang lain (peer debriefing), e). Menganalisis kasus negatif, f). Menggunakan bahan referensi, dan g). Mengadakan *member check*.

Dalam melakukan penelitian ini, untuk mencapai kredibilitas peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memperpanjang masa observasi, Memperpanjang masa observasi dimaksudkan untuk mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin merusak data. Distorsi bisa terjadi karena unsur kesengajaan seperti bohong, menipu, dan berpura-pura oleh subyek, informan, key informan. Unsur kesengajaan dapat berupa kesalahan dalam mengajukan pertanyaan, motivasi, hanya untuk menyenangkan atau menyedihkan peneliti.
- b. Pengamatan terus menerus, Dengan pengamatan terus menerus dan kontinyu, peneliti akan dapat memperhatikan sesuatu dengan lebih cermat, terinci dan mendalam. Pengamatan yang terus menerus, akhirnya akan dapat menemukan mana yang perlu diamati dan mana yang tidak perlu untuk diamati sejalan dengan usaha pemerolehan data. Pengamatan secara

terus menerus dilakukan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian tentang fokus yang diajukan.

- c. Triangulasi data, Tujuan triangulasi data dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengecek kebenaran data dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian di lapangan. Triangulasi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan sumber dan metode, artinya peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Triangulasi data dengan sumber ini antara lain dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan *key informan*. Triangulasi data dilakukan dengan cara, pertama, membandingkan hasil pengamatan pertama dengan pengamatan berikutnya. Kedua, membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Membandingkan data hasil wawancara pertama dengan hasil wawancara berikutnya. Penekanan dari hasil perbandingan ini bukan masalah kesamaan pendapat, pandangan, pikiran semata-mata. Tetapi lebih penting lagi adalah bisa mengetahui alasan-alasan terjadinya perbedaan.
- d. Membicarakan dengan orang lain (*peer debriefing*), Mendiskusikan hasil data dengan orang lain yang paham dengan penelitian yang sedang dilakukan.

- e. Menganalisis kasus negatif, Menganalisis kasus negatif maksudnya adalah mencari kebenaran dari suatu data yang dikatakan benar oleh suatu sumber data tetapi ditolak oleh sumber yang lainnya.
- f. Menggunakan bahan referensi sebagai pembanding dan untuk mempertajam analisa data.
- g. Mengadakan *member check*. Tujuan mengadakan *member check* adalah agar informasi yang telah diperoleh dan yang akan digunakan dalam penulisan laporan dapat sesuai dengan apa yang dimaksud oleh informan, dan *key informan*. Untuk itu dalam penelitian ini *member check* dilakukan setiap akhir wawancara dengan cara mengulangi secara garis besar jawaban atau pandangan sebagai data berdasarkan catatan peneliti tentang apa yang telah dikatakan oleh responden. Tujuan ini dilakukan adalah agar responden dapat memperbaiki apa yang tidak sesuai menurut mereka, mengurangi atau menambahkan apa yang masih kurang. *Member check* dalam penelitian ini dilakukan selama penelitian berlangsung-sewaktu wawancara secara formal maupun informal berjalan.

2. Validitas Eksternal (Transferabilitas)

Validitas eksternal berkenaan dengan masalah generalisasi, yakni sampai dimanakah generalisasi yang dirumuskan juga berlaku bagi kasus-kasus lain diluar penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak dapat menjamin keberlakuan hasil penelitian pada subyek lain. Hal ini disebabkan karena penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menggeneralisir, karena dalam

penelitian kualitatif tidak menggunakan sampling acak atau senantiasa bersifat *purposive sampling*.

3. Dependabilitas

Dependabilitas atau reliabilitas instrumen adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan ulang terhadap gejala yang sama dengan alat pengukur yang sama. Untuk dapat mencapai tingkat reliabilitas dalam penelitian ini, maka dilakukan dengan teknik ulang atau *check recheck*.

4. Objektivitas

Dalam penelitian kualitatif peneliti harus berusaha sedapat mungkin memperkecil faktor subyektifitas. Penelitian akan dikatakan obyektif bila dibenarkan atau di *confirm* oleh peneliti lain. Maka obyektifitas diidentikkan dengan istilah *confirmability*.

IV. GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Geografi

1. Letak Kelurahan Sepang Jaya

Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota Provinsi Lampung, sekaligus sebagai pusat perdagangan dan jasa terbesar di Provinsi ini. Selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan juga merupakan pusat kegiatan perekonomian Provinsi Lampung. Kota ini terletak diwilayah strategis karena merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antar Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan kota.

Secara Geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5°20' sampai dengan 5°30' lintang selatan dan 105°28 sampai dengan 105°37 bujur timur. Ibukota Provinsi Lampung ini berada di Teluk Lampung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera. Sedangkan, luas Wilayah daratan 169,21 km² yang terbagi kedalam 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan dengan populasi penduduk 1.446.160 jiwa (berdasarkan data tahun 2012), kepadatan penduduk sekitar 8.546 jiwa/km² dan diproyeksikan pertumbuhan penduduk mencapai 2,4 juta jiwa pada tahun 2030. Saat ini Kota Bandar Lampung merupakan pusat jasa, perdagangan, dan perekonomian di Provinsi Lampung.

Secara administratif Kota Bandar Lampung dibatasi oleh Kecamatan Natar, Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran salah satu wilayah pemekaran di sebelah utara. Lalu, dibagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran serta perairan Teluk Lampung. Selanjutnya, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung selatan dan Kabupaten Pesawaran dibagian barat bersebelahan Kota Bandar Lampung.

Secara khusus Kelurahan Sepang Jaya merupakan tempat pemukiman penduduk yang dulunya masih berupa kampung atau desa yang terdiri atas lahan sawah yang begitu besar dan kini semakin hari banyak dibangun pemukiman warga, karena lokasi Kelurahan Sepang Jaya tidak begitu jauh dengan pusat kota dan tidak begitu jauh dengan pusat pendidikan yaitu universitas negeri atau universitas swasta.

2. Sejarah singkat Kelurahan Sepang Jaya

Sejarah Kelurahan Sepang Jaya disusun berdasarkan fakta yang masih ada, dan keterangan dari beberapa orang tua-tua kampung yang masih hidup. Adapun kata Sepang Jaya berasal dari 2 desa yang dijadikan satu kelurahan yaitu Kota Sepang dan Jayapura, yang rata-rata yang berdomisili sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Karena dahulu kota sepang dan jayapura adalah lokasi persawahan yang luas dan kini lokasi persawahan tersebut semakin sempit Karena sudah banyaknya pendatang baru yang membangun pemukiman atau rumah.

Pada saat Pada saat ini Kelurahan Sepang Jaya mempunyai luas wilayah 48 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Labuhan Ratu Raya Kecamatan Labuhan Ratu
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu .

Secara geografis Kelurahan Sepang Jaya merupakan daerah daratan dan sebagian besar lahan pemukiman yakni seluas 83,74 ha/m², kemudian sebagian lain untuk perkebunan, persawahan, kuburan, pekarangan, taman, perkantoran dan sarana prasarana lainnya.

B. Demografi

Penduduk Kelurahan Sepang Jaya pada tahun 2016 berjumlah 8.978 jiwa dengan jumlah pendudukan laki-laki sebanyak 4.406 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 4.572 jiwa dan terdiri dari 2.408 KK jumlah kepadatan penduduk adalah 101.171 per km. Penduduk Kelurahan Sepang Jaya sebagian besar memeluk agama Islam.

C. Gambaran Umum Pemerintah dan Perangkat Kelurahan Sepang Jaya

Untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung didukung perangkat kelurahan yang berjumlah 6 orang dan 3 orang staf dengan susunan seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Susunan Organisasi Kelurahan Sepang Jaya

No	Nama	Jabatan
1	Syamsu Nilam, SH	Lurah
2	Heppy	Sekretaris
3	Leniyar, S.I.P	Kasi Pemerintahan
4	Liana Krista Yusufin, SH	Kasi Pembangunan
5	Hamdi Perdana Putra, SH	Kasi Trantib
6	Rosmini	Kasi pemberdayaan masyarakat

Sumber: Profil kelurahan Sepang Jaya (2016)

Pemerintah kelurahan Sepang Jaya terdiri dari:

a. Lurah

Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

b. Perangkat desa

1) Sekretaris Kelurahan

Kedudukan dari sekretaris kelurahan yaitu sebagai staf pembantu lurah dan pemimpin sekretariat kelurahan sendiri. Tugasnya yaitu menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada lurah.

2) Kepala Seksi

Kedudukan kepala seksi yaitu sebagai unsur pembantu sekretaris kelurahan dalam bidang tugasnya. Tugas utamanya yaitu menjalankan

kegiatan-kegiatan sekretaris lurah dalam bidang tugasnya masing-masing. Kepala seksi di Kelurahan Sepang Jaya ada 4 yaitu, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi keamanan dan ketertiban, kepala seksi pembangunan, kepala seksi pembinaan masyarakat.

D. Susunnan Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Susunan Informan Penelitian

No	Nama	Alamat	Umur (tahun)	Jabatan
1	Syamsu Nilam, SH	Sepang Jaya	46	Lurah
2	Heppy	Sepang Jaya	35	Sekretaris
3	Leniyar, S.I.P	Sepang Jaya	34	Kasi Pemerintahan
4	Liana Krista Yusufin, SH	Sepang Jaya	32	Kasi Pembangunan
5	Hamdi Perdana Putra, SH	Sepang Jaya	29	Kasi Trantib
6	Darul Luminto	Sepang Jaya	40	Warga
7	Aswanto	Sepang Jaya	53	Warga
8	Muzaidi	Sepang Jaya	36	Warga
9	Dawam	Sepang Jaya	42	Warga
10	Chandra Wati	Sepang Jaya	32	Warga

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan aparat keplurahan dalam pembangunan fisik di Kelurahan Sepang Jaya dapat dilihat dari adanya upaya Lurah beserta jajarannya yang bekerjasama dengan kepala lingkungan yang merupakan tokoh masyarakat di daerahnya. Sebagai pemerintah tingkat bawah pemerintah kelurahan hanya bisa mengusulkan serta mendampingi semua pembangunan secara fisik yang ditetapkan oleh hasil Musrembang di tingkat kecamatan. Karena pemerintah kelurahan hanya bisa menjalankan perintah kordinasi dari pemerintah tingkat kecamatan yang merupakan wilayah administrasinya. Peranan pemerintah kelurahan sebagai pelayan masyarakat dalam melayani masyarakat pemerintah kelurahan bisa dikatakan telah memuaskan warga sehingga pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan Sepang Jaya dapat berjalan atau terlaksana dengan lancar karena adanya dukungan dari seluruh masyarakat.

B. Saran

1. Peningkatan peranan pemerintah Kelurahan Sepang Jaya dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Sepang Jaya harus dioptimalkan lagi dengan berupaya semaksimalnya untuk merangsang masyarakat untuk ikut berpartisipasi, di mana guna mewujudkan cita-cita pembangunan yakni tercapainya hidup sejahtera kepada semua warga masyarakat Kelurahan

Sepang Jaya.

2. Kepada Lurah agar kiranya tetap berupaya semaksimal mungkin membuka ruang kepada masyarakat agar tidak segan memberi aspirasinya. Dan untuk aparat pemerintah kelurahan tingkatkan kerjasama yang baik dan hubungan yang harmonis demi terciptanya pelayanan yang optimal kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Agar kualitas sumber daya manusia aparat pemerintah Kelurahan Sepang Jaya yang masih tamatan SMA agar segera melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi dan mangupayakan penguasaan keterampilan (*skill*) yang handal.

DAFTAR PUSTKA

- Amirullah, 2004, *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anwar 2005. *Evaluasi Kinerja*. Refika Aditama. Bandung
- Bappenas, 2003, *Kebijakan Nasional Pembangunan Prasarana Dan Sarana Air. Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Lembaga*. Jakarta.
- Bastian, 2010, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta. STIE YKPN.
- Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mesuji, 2015, *Profil Dinas Pekerjaan Umum. Kabupaten Mesuji*.
- GTZ, 2006, *Panduan Pembangunan Klaster Industri Untuk Pengembangan. Ekonomi Daerah Berdaya Saing*. Jakarta
- Horton dan Hunt, 2007. *Sosiologi Jilid I*, Jakarta, PT. Raja Grafindo. Persada
- Howlett, 2005, *Studying Public Policy: Policy Cycles*, Universitas Gadjah Mada Press, Jogjakarta
- Innes, 2006, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Islamy, 2003, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Kamus Besar Bahasa Indonesia 2006, Balai Pustaka, Jakarta.
- Keban, 2010, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Lester, 2006, *Public Policy : An Evolutionary Approach*. Australia :Wadsworth.
- Maleong, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mayer, 2009, *Policy and Program Planning, A Developmental Perspective*, Edisi Terjemahan. Jakarta : Bumi Aksara
- Milles dan Huberman, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.

- Miraza, 2005, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. ISEI. Bandung.
- Munir, 2002, *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Nazir, 2008, *Metode Penelitian*, Salemba Empat, Jakarta
- Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo, Jakarta.
- Purwanto dan Sulistyastuti, 2007, *Metode Penelitian. Kuantitatif: Untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial*. Gaya Media Jogjakarta
- Sirojuzilam dan Mahalli, 2010, *Regional : Pembangunan, Perencanaan, dan Ekonomi*, USU Press, Medan.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru. Rajawali Pers Jakarta.
- Soetopo, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia.
- Solichin, 2004, *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke. Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Solihin, 2008, *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke. Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Revisi Jakarta : Bumi Aksara
- Sunarko, 2006, *Pengantar Manajemen Publik*, Gramedia Pustaka. Utama
- Tjokroamidojo, 2003, *Paradigma Baru Manajemen Sumberdaya Manusia*, Gramedia Pustaka. Utama
- Wresniwiro, 2007, *Membangun Republik Desa*. Visimedia. Jakarta